

CATATAN PEMANTAUAN PEMILU 2024

**INDONESIA CORRUPTION WATCH
THEMIS INDONESIA
ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN**

&

TIM PEMANTAU DI 10 DAERAH

KOALISI TOLAK PEMILU CURANG

PEMANTAUAN DI 10 DAERAH

- Aceh
- Sumatera Utara
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Banten
- Bali
- NTT
- Kalimantan Timur
- Sulawesi Selatan

Catatan:

- Tidak menjangkau semua wilayah karena keterbatasan pemantau.
Umumnya hanya 2 pemantau di tiap daerah
- Pemantauan lapangan efektif berjalan sejak 25 Januari 2024

FOKUS PEMANTAUAN

- **Politik Uang**
- **Penyalahgunaan Fasilitas Negara**
- **Netralitas Pejabat Negara/ Aparatur Negara dan Desa**
- **Netralitas/ Profesionalitas Penyelenggara**
- **Pemungutan dan Rekapitulasi Suara (14-20 Maret 2020)**

Metode pengumpulan informasi:

- **Pemantauan lapangan**
- **Tracking sosial media dan pemberitaan media**

Waktu pemantauan lapangan:

- **Pemantauan lapangan efektif berjalan sejak 25 Januari 2024**

TEMUAN SEMENTARA (PEMANTAUAN DI 10 DAERAH)

- Per 10 Februari 2024, terdapat 53 dugaan kecurangan pemilu yang sudah diverifikasi awal.

Kategori	Jumlah	%
Pileg	21	40%
Pilpres	21	40%
Pileg-Pilpres	6	11,3%
Lainnya/ Belum Diketahui	5	9,4%
Total	53	100%

- 22 dari 27 (81%) temuan dan informasi dugaan kecurangan berkaitan dengan Pilpres mengarah pada kampanye/ dukungan untuk paslon Prabowo-Gibran dan 4 (15%) mengarah pada kampanye/ dukungan untuk paslon Ganjar-Mahfud.

TEMUAN SEMENTARA (PEMANTAUAN DI 10 DAERAH)

Jenis Kecurangan	Jumlah
Penyalahgunaan Fasilitas Negara	7
Netralitas Pejabat/ Aparatur Negara dan Desa	22
Netralitas/ Profesionalitas Penyelenggara Pemilu	10
Politik uang	20
Lainnya	2

PENYALAHGUNAAN FASILITAS NEGARA

- **Modus:**
 - **Politisasi bantuan rice cooker Kementerian ESDM**
 - **Rapat kerja yang dibiayai anggaran negara disertai narasi ajakan memilih peserta pemilu tertentu**
 - **Ancaman penghentian bansos apabila tidak memilih peserta pemilu tertentu**
 - **Kendaraan dinas berada di tempat parkir kegiatan kampanye**
 - **Kegiatan pemerintah disertai atribut yang mengarah pada dukungan/ afiliasi terhadap peserta pemilu tertentu**

NETRALITAS PEJABAT NEGARA/ APARATUR NEGARA/ PEMERINTAH DESA

- **Modus:**
 - **Politisasi kepala desa untuk mendukung calon tertentu**
 - **Kepala desa menyatakan/ menunjukkan dukungan kepada capres/ caleg: video, pose, terlibat aktif/ pasif dalam kegiatan kampanye**
 - **Kepala daerah memberi penjelasan mengenai kampanye capres yang didukungnya, padahal tidak cuti**
 - **Menteri bukan peserta pemilu dan tidak terdaftar dalam tim kampanye, berkampanye di hari kerja**
 - **Pejabat negara kampanye di acara pemerintah**

NETRALITAS/ PROFESIONALITAS PENYELENGGARA PEMILU

- **Modus:**
 - **Pemerasan sebagai timbal balik tindak lanjut pelanggaran pemilu**
 - **Bawaslu daerah mengarahkan panwascam untuk memihak**
 - **Anggota KPPS menunjukkan pose yang mengarah pada dukungan capres tertentu**
 - **Tidak memberikan informasi kampanye (saat dimintai informasi)**

POLITIK UANG

- **Bagi-bagi doorprize fantastis: motor, sepeda listrik, paket umroh, mobil, rumah, kulkas, dst**
- **Bagi-bagi minyak goreng, paket sembako**
- **Tebus murah paket sembako**
- **Pemberian uang tunai Rp 50-500.000,-**
- **Iming-iming pemberian beasiswa dalam iklan kampanye**

3 MASALAH LAIN

- **Pejabat negara (menteri) non anggota partai dan bukan peserta pemilu kampanye pada hari kerja**
- **Dugaan kampanye terselubung menggunakan fasilitas negara**
- **Peran Bawaslu dan jajarannya dalam mengawasi pemilu dan menindaklanjuti aduan publik**

KAMPANYE TERSELUBUNG WALIKOTA MEDAN?



Pasal 282

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.



[Pengumuman](#)[Peserta](#)[Hasil Evaluasi](#)[Pemenang](#)[Pemenang Berkontrak](#)

Nama Tender	Jasa Penyelenggaraan Acara (Medan Fashion Festival)
Jenis Pengadaan	Jasa Lainnya
K/L/PD/Instansi Lainnya	Kota Medan
Satuan Kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Pagu	Rp. 2.000.000.000,00
HPS	Rp. 1.999.958.500,00
Nama Pemenang	Alamat
CV. NABILA	JL M YAKUB GG HASIBAH NO 14 KEL SEI KERA HILIR II KEC MEDAN PERJUANGAN - Medan (Kota) - Sumatera Utara



PEMERINTAH KOTA MEDAN

[HOME](#)[SELYANG PANDANG](#)[PEMERINTAHAN](#)[INF](#)

BERITA :



Senin, 04 Desember 2023, 08:38:57 | Kota Medan | Dibaca 184 Kali | Share

[f FACEBOOK](#)[TWITTER](#)

Sukses Gelar MFF, Bobby Nasution Ingin Medan Kiblat Fashion

KAMPANYE PEJABAT NEGARA

Bagian Kedelapan

Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara Lainnya

Pasal 299

- (1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai, anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:
 - a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
 - b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
 - c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

- **Sejumlah menteri dan kepala daerah aktif berkampanye, bahkan di hari kerja**
 - **Informasi cuti pejabat negara tidak dipublikasikan KPU/ Bawaslu**
- **Menteri non partai dan bukan peserta pemilu kampanye, apakah boleh?**

BAWASLU/ PANWASLU?

Pasal 307

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu.

- **Banyak dugaan pelanggaran bertebaran di sosmed dan pemberitaan media, tetapi tidak diikuti langkah pro aktif pengawas pemilu untuk penanganan pelanggaran.**
- **Aduan pemantau/ publik kerap berujung pada:**
 - **Tidak bisa ditindaklanjuti karena pelapor/ terlapor tidak hadir**
 - **Tidak memenuhi syarat materiil**
 - **Tidak memenuhi unsur pelanggaran**

PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap Laporan, diberitahukan status Laporan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	ALASAN
1	Pelapor : Neni Nurhayati Terlapor : Ridwan Kamil	002/Reg/LP/PP/Prov/ 13.00/II/2024	Tidak ditindaklanjuti ke Penyidikan Kepolisian	Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur pasal dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu



PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil kajian awal terhadap laporan, diberitahukan status laporan sebagai berikut :

No	Nama Pelapor dan Terlapor	Nomor Laporan	Status Laporan	Alasan
1	Pelapor I : Yayasan Dewi Keadilan Indonesia Pelapor II : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Pelapor III : Sdri. Gina Sabrina Pelapor IV : Sdr. Delpedro Marhaen Terlapor I : Sdr. Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan sekaligus Peserta Pemilu Presiden Nomor Urut 2) Terlapor II : Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan (Selaku Pengelola Akun Resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada Akun Media X @Kemhan_RI)	035/LP/PP/RI/00.00/II/2024	Tidak Diregistrasi	Tidak memenuhi syarat materiel

Jakarta, 26 Januari 2024
BADAN PENGAWAS PEMILU
KETUA



RAHMAT BAGJA

TITIK RAWAN KECURANGAN HARI TENANG DAN PUNGUT-HITUNG-REKAP SUARA

- **Politik uang - jual beli suara**
 - **Door to door, melalui broker suara, serangan fajar dan pasca bayar**
 - **Intimidasi dengan iming-iming penyetopan/ penyaluran bansos**
- **Manipulasi suara**
 - **Pemanfaatan sisa surat suara/ surat suara tidak terpakai (pemilih golput)**
 - **Manipulasi penghitungan**
 - **Manipulasi rekap penghitungan**
- **Kampanye terselubung dalam kegiatan kementerian atau pemerintah daerah pada hari tenang.**
- **Intimidasi pemilih atas nama distribusi bansos**